

Analisis Politik Luar Negeri Arab Saudi Dalam upaya Melakukan Normalisasi Arab Saudi-Israel

Adam Maulana Wijaya

Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

E-mail: adammaulanawijaya5@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze Saudi Arabia's foreign policy in an effort to normalize relations with Israel. In the complex regional context of the Middle East, Saudi-Israel normalization has become a very sensitive and controversial topic. This research identifies a number of factors influencing Saudi foreign policy regarding normalization, including pressure from the United States, regional geopolitical changes especially related to Iran, normalization by other Arab countries, relations with Palestine, leadership changes in Saudi Arabia, and security considerations and economy. The results of this study illustrate the complex dynamics in Saudi foreign policy and how these factors are interconnected in the effort to achieve normalization with Israel.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik luar negeri Arab Saudi dalam upaya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dalam konteks regional yang kompleks di Timur Tengah, normalisasi Saudi-Israel telah menjadi topik yang sangat sensitif dan kontroversial. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Saudi terkait normalisasi, termasuk tekanan dari Amerika Serikat, perubahan geopolitik regional terutama berkaitan dengan Iran, normalisasi oleh negara-negara Arab lainnya, hubungan dengan Palestina, perubahan kepemimpinan di Saudi Arabia, dan pertimbangan keamanan dan ekonomi. Hasil penelitian ini menggambarkan dinamika kompleks dalam kebijakan luar negeri Saudi dan bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan dalam upaya mencapai normalisasi dengan Israel.

Keywords: Arab Saudi, Normalisasi, Israel, Politik Luar Negeri, Palestina

PENDAHULUAN

Hubungan Saudi dengan Amerika Serikat telah lama menjadi pilar penting dalam kebijakan luar negeri negara Arab. Saudi Arabia dan Amerika Serikat menjalin kemitraan yang erat, yang mengakar dalam kerjasama militer, keamanan, dan ekonomi. Keduanya memiliki persamaan pandangan politik dalam beberapa isu regional dan global ¹. Hubungan yang kuat

Article History: Received 15 December 2023, Revised 12 February 2024,
Accepted 15 April 2024, Available online 01 November 2024

Copyright: © 2024 Integrative International Relations.

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution 4.0 International License**.

dengan AS memberikan Arab Saudi akses ke teknologi militer canggih, dukungan keamanan, serta investasi ekonomi yang substansial. Namun, peran Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel juga mempengaruhi dinamika hubungan Saudi-Israel. Tekanan politik dari AS untuk normalisasi hubungan dengan Israel telah menjadi faktor penting yang mendorong Arab Saudi untuk memper-timbangkan lebih lanjut kerja sama dengan Israel. Selain itu, perubahan geopolitik regional terutama terkait dengan ketegangan antara Saudi dan Iran berperan dalam membentuk pandangan Saudi terhadap Israel. Mengidentifikasi Iran sebagai ancaman regional, menciptakan potensi kesamaan kepentingan dalam menghadapi tantangan tersebut, pada gilirannya mendorong Saudi untuk lebih terbuka terhadap kolaborasi dengan Israel dalam upaya menghadapi ancaman bersama di kawasan Timur Tengah ².

Normalisasi hubungan oleh negara-negara Arab lainnya, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, dengan Israel, telah menjadi elemen penting dalam lanskap politik Timur Tengah. Langkah-langkah ini telah menciptakan tekanan politik pada Arab Saudi untuk mengikuti jejak dalam menghadapi normalisasi oleh rekan-rekannya di dunia Arab. Saudi Arabia mungkin merasa semakin terdorong untuk mengeksplorasi peluang normalisasi hubungan dengan Israel. Adanya negaranegara Arab lain yang telah memutuskan hubungan dengan Israel menunjukkan bahwa ada ruang bagi kerja sama regional yang lebih luas dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan. Kebijakan Saudi dalam hal normalisasi dengan Israel juga dipengaruhi oleh isu-isu yang berkaitan dengan Palestina. Palestina selalu menjadi isu sensitif di dunia Arab dan dalam kebijakan luar negeri Saudi. Negara ini memiliki sejarah panjang dukungan terhadap Palestina dan prinsip-prinsip solusi dua negara sebagai upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Meskipun Saudi telah dihadapkan pada tekanan untuk normalisasi, mereka juga harus memper-timbangkan bagaimana langkah tersebut akan memengaruhi perjuangan Palestina dan reputasi di dunia Arab. Membuka hubungan dengan Israel dapat menjadi tindakan yang kontroversial dan berisiko, sehingga Saudi Arabia harus merenungkan dampaknya terhadap peran dan kedudukan mereka dalam konflik Israel-Palestina serta di tingkat regional lebih luas.

Pada tahun 2017, Arab Saudi menyaksikan perubahan signifikan dalam kepemimpinan ketika Pangeran Mahkota Muhammad bin Salman naik ke tampuk kekuasaan. Dalam periode pemerintahannya, ia telah mendorong serangkaian reformasi besar, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Upaya modernisasi dan diversifikasi ekonomi yang dikenal dengan "Vision 2030" telah menjadi fokus utama dari kebijakan dalam negeri Saudi ³. Konteks ini, terdapat spekulasi bahwa Pangeran Mahkota mungkin lebih cenderung untuk mempertimbangkan Normalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari agenda modernisasi.

Upaya memperkuat ekonomi dan membuka Saudi Arabia ke dunia, normalisasi dengan Israel dianggap sebagai langkah yang memungkinkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi. Masalah keamanan regional dan terorisme telah menjadi prioritas utama bagi Saudi Arabia dan banyak negara di Timur Tengah. Negara ini telah menghadapi serangan-serangan terorisme oleh kelompok - kelompok seperti Al-Qaeda, yang menyebabkan kekhawatiran akan stabilitas dan keamanan. Beberapa analis telah berpendapat bahwa kerja sama dengan Israel dalam bidang keamanan dan intelijen dapat membantu mengatasi ancaman bersama di kawasan tersebut. Kolaborasi dalam pertukaran informasi, pelatihan keamanan, dan strategi kontra-terorisme mungkin akan memungkinkan Saudi untuk lebih efektif menghadapi ancaman terorisme yang ada di Timur Tengah. Oleh karena itu, perubahan kepemimpinan dan kekhawatiran keamanan regional menjadi faktor yang mempengaruhi pertimbangan Saudi untuk mempertimbangkan normalisasi hubungan dengan Israel.

Analisis kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait dengan normalisasi hubungan Israel memang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks kompleks di wilayah Timur Tengah. Keputusan yang akan diambil oleh Saudi Arabia dalam hal ini akan mencerminkan dinamika yang rumit dan faktor-faktor yang beragam. Faktor-faktor tersebut melibatkan tekanan internal dari masyarakat dan tokoh-tokoh politik di dalam negeri, serta tekanan eksternal dari aktor-aktor seperti Amerika Serikat dan negara-negara Arab lainnya yang telah melakukan normalisasi. Terlepas dari itu, faktor-faktor politik dan reputasi di tingkat regional dan internasional juga harus menjadi bagian dari pertimbangan. Dalam menghadapi kompleksitas ini, Saudi Arabia harus menjalani proses yang hati-hati dan berwawasan panjang dalam menentukan kebijakan luar negerinya terkait normalisasi dengan Israel.

Peran Politik Negeri Arab Saudi Dalam UPAYA Normalisasi

Arab Saudi telah mengadopsi pendekatan pragmatis yang menandai hubungannya dengan Israel sebagai mitra potensial dalam menangani ancaman regional, terutama yang berasal dari Iran. Posisi ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pandangan politik regional Saudi yang tampaknya lebih fokus pada kepentingan keamanan nasional daripada pada isu-isu ideologis yang mungkin telah mendominasi pandangan mereka di masa lalu ⁴. Saudi Arabia menyadari bahwa kebijakan pragmatis ini dapat membantu menghadapi tantangan regional dengan lebih efektif.

Pendekatan pragmatis, teori kerjasama tertutup menjadi salah satu aspek yang menarik dalam peran politik Saudi ⁵. Meskipun belum ada normalisasi resmi dengan Israel spekulasi tentang hubungan yang lebih dekat di luar pengetahuan publik atau di bawah radar. Arab Saudi

memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara Israel dan negara-negara Arab lainnya yang berupaya melakukan normalisasi. Melalui diplomasi regional yang lebih rahasia, Saudi Arabia dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan kerja sama di antara pihak-pihak yang terlibat dalam upaya normalisasi. Pendekatan semacam ini memungkinkan Saudi untuk menjalani diplomasi tanpa harus menghadapi tekanan dan tantangan yang muncul secara terbuka di mata publik.

Dalam konteks diplomasi regional, Saudi Arabia memegang peran kunci dalam politik Timur Tengah. Pengaruh regional yang besar, Saudi Arabia memiliki potensi untuk memengaruhi sikap negara-negara Arab lainnya terkait dengan normalisasi hubungan dengan Israel. Pendekatan politik Saudi dan keputusan menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana normalisasi ini dapat berkembang dalam kawasan. Dalam upaya untuk mempromosikan stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah, Saudi Arabia mungkin akan berusaha untuk memainkan peran mediator yang konstruktif dalam mengatasi ketegangan dan perbedaan antara negara-negara Arab dan Israel.

Saudi Arabia mempertimbangkan rasa tanggung jawab pan-Arab terhadap isu Palestina. Negara ini sering dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki "tanggung jawab pan-Arab" untuk mendukung Palestina dan perjuangannya. Menerapkan kebijakan normalisasi dengan Israel, Saudi Arabia perlu mempertimbangkan dengan hati-hati dampaknya terhadap reputasi di mata dunia Arab. Keputusan ini mempertimbangkan kekhawatiran rakyat Saudi dan pemangku kepentingan di seluruh dunia Arab yang umumnya mendukung hak-hak Palestina. Dengan demikian, kebijakan Saudi harus mencari keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab regional mereka terhadap isu Palestina. Hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat memegang peranan kunci dalam konteks normalisasi hubungan dengan Israel. Saudi Arabia telah menjaga hubungan yang erat dengan AS selama beberapa dekade. Amerika Serikat adalah sekutu penting Saudi dalam hal keamanan, politik, dan ekonomi. Hubungan ini telah memberikan Saudi akses ke teknologi militer canggih, dukungan keamanan, serta investasi ekonomi yang substansial.⁶

Tekanan atau dukungan dari Amerika Serikat dalam upaya normalisasi dengan Israel menjadi faktor penting yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Saudi. Saudi Arabia merasa tekanan dari AS untuk mengikuti jejak negara-negara Arab lain yang telah melakukan normalisasi dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain⁷. Keputusan Saudi akan dipengaruhi oleh dinamika hubungannya dengan Amerika Serikat dan sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan strategis AS di Timur Tengah. Oleh karena itu, dalam menganalisis peran politik Saudi dalam upaya

normalisasi dengan Israel, tidak dapat diabaikan peran utama AS dalam membentuk dinamika regional ini.

Pandangan Politik Dalam Isu Regional Dan Global Hubungan Saudi Dengan Amerika

Keamanan regional telah menjadi fokus utama dalam pandangan politik Saudi Arabia, yang telah lama memegang peran penting dalam politik regional Timur Tengah. Sebagai garda terdepan dalam menangani ancaman regional, khususnya yang berasal dari Iran kerjasama erat dengan Amerika Serikat, Saudi Arabia telah memainkan peran kunci dalam upaya untuk mengatasi ketegangan regional, yang mencakup isu-isu seperti program nuklir Iran yang dikhawatirkan dan konflik di Yaman. Saudi Arabia memandang Iran sebagai ancaman regional dan melihat diri sebagai sekutu alami AS dalam menyeimbangkan pengaruh Iran di kawasan tersebut. Perang di Yaman telah menjadi topik signifikan yang memengaruhi pandangan politik Saudi Arabia dalam hubungannya dengan Amerika Serikat ⁸.

Keterlibatan Saudi Arabia dalam konflik di Yaman mencerminkan kebijakan regional mereka dan pertimbangan keamanan. Meskipun mendapat dukungan militer dari AS, perang di Yaman telah menuai kritik internasional yang signifikan, termasuk dari dalam Amerika Serikat⁹. Hal ini menciptakan tantangan bagi hubungan bilateral, karena kritik atas dampak kemanusiaan konflik tersebut mempengaruhi pandangan politik terhadap konflik tersebut dan hubungan Saudi Amerika yang kompleks. Arab Saudi dan Amerika Serikat mempunyai kepentingan yang sama dalam memerangi terorisme global. Arab Saudi telah melakukan upaya untuk melawan kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan ISIS dan telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal ini. Sikap politik mereka mencerminkan komitmen mereka untuk memerangi ekstremisme dan menjaga keamanan regional dan global.

Mengenai masalah energi, Arab Saudi, sebagai produsen minyak terbesar di dunia, memiliki hubungan energi yang penting dengan Amerika Serikat yang berdampak signifikan terhadap hubungan bilateral kedua negara. Kedua negara mempunyai kepentingan bersama dalam menjamin stabilitas pasar minyak global dan menjaga harga minyak yang wajar. Posisi politik Arab Saudi dalam isu energi sejalan dengan perannya sebagai pemain utama dalam geopolitik energi global.

Hubungan militer antara Saudi Arabia dan Amerika Serikat adalah elemen kunci dalam hubungan telah membeli senjata canggih dan peralatan militer dari AS, menjadikannya sebagai salah satu pasar utama untuk peralatan militer Amerika ¹⁰. Selain itu, keduanya telah menjalin kerja sama keamanan yang erat, yang mencakup pelatihan militer, pertukaran intelijen, dan dukungan militer dalam berbagai isu keamanan regional. Pandangan

politik Saudi dalam konteks ini mencerminkan upaya menjaga dan memperkuat kekuatan militer untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasional dalam isu regional dan global selalu mencerminkan kebijakan luar negeri mereka yang berfokus pada keamanan nasional, stabilitas regional, dan menjaga hubungan erat dengan Amerika Serikat yang dianggap sebagai sekutu kunci dalam menjaga kepentingan mereka di tingkat internasional.

Dalam hal ini, kebijakan Saudi Arabia cenderung berusaha untuk memastikan bahwa kekuatan militer mereka tetap relevan dan efektif, sehingga mereka dapat mengatasi ancaman regional dan global yang mungkin muncul. Hubungan militer yang kuat dengan AS adalah salah satu elemen kunci dalam menjalankan strategi keamanan dan luar negeri Saudi.

Normalisasi Arab Saudi-Israel Di Lihat Dari Prespektif Teori Kerjasama

Teori kerjasama (cooperation theory) dalam ilmu hubungan internasional adalah pendekatan yang memfokuskan perhatian pada potensi dan mekanisme kerjasama antara negara-negara dalam mencapai tujuan bersama atau mengatasi masalah bersama di lingkup internasional. Dalam teori ini, kerjasama diasumsikan sebagai jalur yang dapat memungkinkan negara-negara bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik daripada jika mereka bersaing atau berkonflik.

Merujuk pada pemahaman bahwa negara-negara memiliki insentif untuk bekerjasama guna memenuhi kepentingan bersama atau mencapai keuntungan bersama. Tokoh penting dalam pengembangan teori kerjasama adalah Robert Keohane, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat. Bersama dengan Joseph Nye, Keohane memainkan peran kunci dalam mengembangkan konsep "regime theory" atau teori rezim dalam ilmu hubungan internasional. Teori rezim menekankan pentingnya perjanjian internasional, lembaga-lembaga internasional, dan aturan-aturan internasional dalam membentuk kerjasama di antara negara-negara ¹¹. Dalam karyanya yang terkenal bersama Nye, "Power and Interdependence" (1977), menyajikan argumen tentang pentingnya kesalingtergantungan ekonomi dan struktur rezim internasional dalam mendorong kerjasama di tingkat global. Keohane dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan konsep "keamanan kompleks" (complex interdependence) yang menekankan bahwa hubungan internasional tidak hanya berkaitan dengan keamanan militer, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang kompleks. Seiring berjalannya waktu, teori kerjasama telah menjadi salah satu aliran pemikiran utama dalam ilmu hubungan internasional dan membantu membentuk pandangan-pandangan tentang diplomasi, perdamaian, kerjasama internasional, dan berbagai isu global yang membutuhkan kolaborasi lintas negara.

Dalam kerangka teori kerjasama, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks normalisasi Arab Saudi-Israel. Pertama, kerjasama bisa terjadi dalam dua bentuk utama: kerjasama terbuka dan kerjasama tertutup. Kerjasama terbuka mencakup perjanjian yang diumumkan secara publik dan transparan, seperti normalisasi hubungan yang diumumkan secara resmi. Kerjasama tertutup merujuk pada upaya kerjasama yang tidak terlihat oleh publik. Kasus normalisasi Saudi-Israel, ada spekulasi tentang apakah ada elemen kerjasama tertutup yang melibatkan mediator atau negosiator yang bekerja di luar pengetahuan publik. Kedua, normalisasi tersebut juga bisa dipahami sebagai respons terhadap ancaman regional bersama, khususnya yang berasal dari Iran. Teori kerjasama menekankan pentingnya bekerjasama dalam mengatasi ancaman bersama. Dengan melihat normalisasi sebagai upaya bersama untuk mengamankan kawasan dari ancaman regional, pandangan politik Saudi-Israel dalam konteks ini mencerminkan pentingnya kerjasama regional dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Timur Tengah.

Kerjasama ekonomi memainkan peran dalam normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, dan teori kerjasama membantu menjelaskan dasar ekonomi di balik normalisasi ini. Melihat manfaat ekonomi yang signifikan dalam meningkatkan perdagangan, investasi, dan kolaborasi di berbagai sektor. dugaan bahwa normalisasi merupakan upaya bersama untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan secara ekonomi, dengan peluang ekspansi pasar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ¹².

Saudi Arabia, sebagai salah satu negara kunci di Timur Tengah, dapat berperan sebagai pemain sentral dalam membentuk konsensus di tingkat regional dan memfasilitasi kerjasama antara negara-negara Arab lainnya serta Israel. Dalam pandangan politik Saudi-Israel, diplomasi regional berperan penting dalam membawa berbagai pihak ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak dalam upaya menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut. Dengan demikian, teori kerjasama membantu memahami bagaimana faktor ekonomi dan diplomasi berperan dalam normalisasi yang kompleks antara Saudi Arabia dan Israel.

Dampak Normalisasi Politik Arab Saudi Terhadap Kebijakan dinamika hubungan Saudi-Israel

Normalisasi antara Saudi Arabia dan Israel membuka pintu bagi kedua negara untuk menjalin hubungan diplomatik resmi yang sebelumnya tidak ada. Mencakup langkah-langkah seperti pertukaran duta besar, penandatanganan perjanjian perdamaian, serta berbagai bentuk kerja sama di berbagai sektor. Dampak positif dari normalisasi ini mencakup potensi peningkatan kerja sama ekonomi antara Saudi Arabia dan Israel, yang dapat

membantu pertumbuhan ekonomi dan investasi di keduanya. Kolaborasi dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan keamanan dapat membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan dan inovasi yang saling menguntungkan. Normalisasi juga memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk berinteraksi secara lebih dekat secara budaya, yang dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara masyarakat dengan menghadapi ancaman bersama seperti Iran, kolaborasi keamanan antara Saudi Arabia dan Israel.

Peningkatan keamanan regional dan membantu mengurangi ketegangan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada stabilitas di Timur Tengah. Dampak normalisasi hubungan antara Saudi Arabia dan Israel terhadap proses perdamaian Israel-Palestina adalah perdebatan yang kontroversial. Sebagian pihak melihat normalisasi sebagai langkah positif yang dapat mendorong Israel untuk mengambil tindakan lebih lanjut menuju solusi dua negara, karena normalisasi dengan negara-negara Arab dapat memotivasi Israel untuk melakukan langkah-langkah konstruktif dalam rangka perdamaian¹³. Pandangan ini bukan tanpa kritik, dan banyak yang khawatir bahwa normalisasi tersebut dapat melemahkan posisi Palestina dalam perundingan. Palestina mungkin merasa lebih terdesak untuk mengambil tindakan atau melakukan perundingan dengan Israel tanpa persetujuan yang cukup kuat dari negara-negara Arab.

Reaksi dari negara-negara Arab lainnya juga merupakan faktor penting dalam konteks normalisasi. Beberapa negara Arab mungkin mendukung tindakan Saudi Arabia, melihatnya sebagai sebuah langkah maju dalam memperbaiki hubungan dengan Israel dan meningkatkan stabilitas regional. Namun, pengecamnya terhadap ideologis dan sejarah pan-Arab yang kuat dalam mendukung Palestina. Reaksi negara-negara tetangga dapat memengaruhi hubungan Saudi dengan negara-negara Arab lainnya dan berdampak pada diplomasi regional, yang semakin menambah kompleksitas dinamika politik di Timur Tengah. Keputusan untuk melakukan normalisasi dengan Israel berpotensi untuk memengaruhi reputasi Saudi Arabia di wilayah Arab dan di tingkat internasional. Masyarakat di seluruh dunia Arab memiliki pandangan yang kuat tentang isu Palestina, dan Saudi Arabia dianggap sebagai salah satu negara dengan "tanggung jawab pan-Arab" dalam mendukung perjuangan Palestina¹⁴.

Oleh karena itu, normalisasi ini dapat menimbulkan reaksi yang kuat dalam masyarakat Arab, dan Saudi Arabia harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi citra mereka sebagai pemimpin regional dan pendukung perjuangan Palestina. Faktor penting lainnya adalah bagaimana masyarakat Saudi

merespons normalisasi dengan Israel. Reaksi di tingkat domestik dapat memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan luar negeri Saudi dan stabilitas internal. Pemerintah Saudi harus memper-timbangkan perasaan dan pendapat masyarakat Saudi, yang dapat mempe-ngaruhi stabilitas politik dan sosial di dalam negeri. Dengan pertimbangan dampak-dampak tersebut, normalisasi antara Saudi Arabia dan Israel adalah langkah yang sangat kompleks dan berisiko, yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh pemerintah Saudi Arabia dalam konteks dinamika politik yang melibatkan kebijakan luar negeri.

KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai analisis politik luar negeri Arab Saudi dalam upaya melakukan normalisasi dengan Israel, ditemukan bahwa kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait normalisasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Pertimbangan keamanan regional, terutama dalam menghadapi ancaman Iran, telah menjadi faktor utama yang mendorong normalisasi, seiring dengan perubahan geopolitik dan kebijakan Pangeran Mahkota Muhammad bin Salman.

Di samping itu, tekanan dari Amerika Serikat, normalisasi oleh negara-negara Arab lain, hubungan dengan Palestina, dan pertimbangan reputasi dan dampak domestik juga menjadi aspek penting yang harus diperhitungkan. Kesimpulannya, normalisasi Saudi-Israel adalah langkah yang kompleks dan berisiko yang mencerminkan pendekatan pragmatis Saudi dalam menjalankan kebijakan luar negeri mereka. Normalisasi ini membuka pintu bagi hubungan bilateral yang lebih dekat dan berdampak pada stabilitas regional dan proses perdamaian Israel-Palestina, namun juga memiliki dampak besar terhadap reputasi Saudi di dunia Arab dan di tingkat internasional. Dengan demikian, normalisasi ini menggambarkan dinamika hubungan antara faktor keamanan, diplomasi, ekonomi, dan politik dalam kerangka kerjasama regional dan global.

Endnote

¹ Nizzah Amalia Subchan, "Faktor Normalisasi Hubungan Diplomatik Yordania Dengan Qatar: Analisis Dinamika Keamanan Kawasan Dan Identitas Nasional," *Indonesian Journal of International Relations* 4, no. 1 (2020): 25–41.

² Fahma Safin Alhusna, "Kepentingan Arab Saudi terhadap Israel dalam pembangunan jalur Kereta Api Israel-Arab Saudi pada Tahun 2018," *SIYAR Journal* 1, no. 2 (2021): 27–59.

³ Khotibul Umam, "Rivalitas Arab Saudi, Iran, dan Israel di Kawasan Timur Tengah," *Populika* 10, no. 2 (2022): 1–10.

⁴ Indah Fitri dan Sheilvyana Zain, "Analisis Kepentingan Keamanan dan Kepentingan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel," no. June (2023).

-
- ⁵ Broto Wardoyo dan Rizal Valentino, "Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates' Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel 'Breaking taboo': Keputusan Uni Emirat Arab untuk Melakukan Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel" (n.d.): 147–174. ⁶ M. Nasser Rafsanjani, "Potensi Normalisasi Hubungan Diplomatik," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 10, no. 2 (2022): 583–594. ⁶ Zefanya Kharisma Nugroho, "Israel dan Perjanjian Abraham : Upaya Peningkatan Status Israel dalam Sistem Israel dan Perjanjian Abraham : Upaya Peningkatan Status Israel dalam Sistem Internasional," no. July (2023). ⁷ Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan, "Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 18, no. 2 (2022): 133–149. ⁸ R R Antuli dan W Abbas, "Faktor Penyebab Ketegangan Hubungan Arab Saudi Dan Iran Di Kawasan Timur Tengah," *MANDAR: Social Science Journal* (2022): 108–117, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/2944>. ⁹ Siti Aisyah Tajari dan Noraini Zulkifli, "Perkembangan Hubungan Iran-Amerika Syarikat Pasca Perang Dunia Kedua Sehingga Pasca Perang Dingin," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 7, no. 7 (2022): e001663. ¹⁰ Konsentrasi Kajian Timur, Lalu Wahyu, dan Putra Utama, "Firmada Taufiq" (2011), <http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc462604/.pdf>. ¹¹ Andaru Satnyoto, "Perspektif Teori Institusionalisme dan Teori Kritis terhadap Rezim Internasional Lingkungan," *Jurnal Independence* 5, no. 2 (2017): 94–108. ¹² Mohammad Maiwan, "Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 15, no. 1 (2015): 109–125. ¹³ Achmad Fatih Arafat, "Hubungan Diplomatik Antara Negara-Negara Arab dengan Israel: Penghalang Perjuangan Kemerdekaan Palestina," no. June (2023): 0–9, <https://www.researchgate.net/publication/371722307>. ¹⁴ Umam, Khotibul. 2022. "Rivalitas Arab Saudi, Iran, Dan Israel Di Kawasan Timur Tengah". *POPULIKA* 10 (2):1-10. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.509>.

References

- Abayomi, A. Alawode, Aamir Abdul Rehman, Ahmad Hafiz Bin Abdul Aziz, Roselee Shah Bin Shaharudin, dan Shahira Zaireen Bt. Johan Arief Jothi. *Islamic Finance and the Development of Malaysia's Halal Economy. The Malaysia Development Experience Series*. Washington, D.C.: World Bank Group, 2022.
- Aditasari, Dana. "Perdana Menteri Malaysia Cerita Soal Kuatnya Ekonomi Negara Islam." *Detik Finance*, 2 Agustus 2016. Diakses 9 Januari 2023. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3266770/perdana-menteri-malaysiacerita-soal-kuatnya-ekonomi-negara-islam>.
- Chandra Purnama, et al. "Diplomasi Publik Thailand Melalui Industri Halal." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 7, no. 1 (2021): 29–46.

-
- Idealisa, Masyrafina. "Industri Halal di Brunei Jadi Sektor Utama Tarik Investasi." *Republika*, 30 November 2018. Diakses 9 Januari 2023. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/pj0fxm368/industri-halal-di-bruneijadi-sektor-utama-tarik-investasi>.
- International Monetary Fund (IMF). "World Economic Outlook: Real GDP Growth." Diakses 9 Januari 2023. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OMDC/ADVEC/WEOWORLD.
- Islamic Tourism Centre. "Malaysia Unveils Ambitious Plans for Muslim-Friendly Tourism in 2024." Diakses 9 Januari 2023. <https://www.itc.gov.my/malaysia-unveils-ambitious-plans-for-muslim-friendly-tourism-in-2024/>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Tak Hanya Miliki Domestic Market yang Besar, Indonesia Juga Berpeluang Menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia." 9 Desember 2022. Diakses 9 Januari 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4805/takhanya-miliki-domestic-market-yang-besar-indonesia-juga-berpeluang-menjadi-produsenhalal-terkemuka-dunia>.
- Khazanah. "Geliat Industri Halal di Negeri Jiran." *Republika*, 20 Agustus 2018. Diakses 8 Januari 2023. <https://www.republika.co.id/berita/pdqtec313/geliat-industri-halal-di-negerijiran>.
- Mastercard-CrescentRating. *Global Muslim Travel Index 2022*. Singapore: CrescentRating, 2022. Diakses 9 Januari 2023. <https://salaamgateway.s3.us-east-2.amazonaws.com/special-coverage/sgie22/pdf/State%20of%20the%20Global%20Islamic%20Economy%20Report%202022%20-%20Eng.%20Summary%20.pdf>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (Februari 2019).
- Pew Research Center. "The Future of the Global Muslim Population." 27 Januari 2011. Diakses 9 Januari 2023. <https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ANZDOC, 2005.
- State of the Global Islamic Economy Report 2022. *Unlocking Opportunity*. Dubai: Salaam Gateway, 2022.

World Bank. Islamic Finance and the Development of Malaysia's Halal Economy. Washington, D.C.: World Bank Group, 2022.

World Population Review. "Muslim Population by Country 2022." Terakhir diperbarui 31 Desember 2022. Diakses 9 Januari 2023. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>.